

Resistensi Nelayan Cilincing Di Masa Pandemi Covid-19

Henny Kurnia Asharie¹, Nadhira S Jasmin¹, Nandita¹

¹Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

Abstrak

Kehadiran virus Covid-19 pada akhir tahun 2019 mengakibatkan perubahan pada segala aspek kehidupan. Dalam hal ini pemerintah mengambil langkah dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19 dengan memberlakukan kebijakan PSBB (Pembatas Sosial Berskala Besar) pada April 2020. Melihat situasi ini banyak sektor kehidupan yang mengalami dampak yang cukup signifikan, salah satunya ialah kehidupan para nelayan cilincing. Hal tersebut berdampak pada pendapatan dan hasil tangkap mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif model observasi partisipatif, dan melakukan wawancara langsung terhadap tiga nelayan cilincing. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan pola strategi nafkah dan resistensi yang dilakukan oleh para nelayan cilincing di masa pandemic Covid-19.

Kata Kunci: Resistensi, Nelayan, Pola strategi nafkah, PSBB, Covid-19

Abstract

The presence of the Covid-19 virus at the end of 2019 resulted in changes in all aspects of life. In this case, the government took steps to reduce the spread of the Covid-19 virus by enacting a PSBB (Large-Scale Social Barrier) policy in April 2020. Seeing this situation, many sectors of life are experiencing significant impacts, one of which is the life of cilincing fishermen. This has an impact on their income and catch in meeting the needs of daily life. The study used a research method with a skin-close participatory observation model, and conducted in-person interviews with three cilincing fishermen. Based on the results of the study showed that there was a change in the pattern of bread and resistance strategies carried out by cilincing fishermen during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Resistance, Fishermen, Bread strategy patterns, PSBB, Covid-19

PENDAHULUAN

Munculnya virus Covid-19 sejak akhir tahun 2019 menyebar hampir di seluruh negara termasuk Indonesia. Peristiwa tersebut mengakibatkan segala aspek kehidupan masyarakat berubah secara signifikan, misalnya kegiatan yang biasa dilakukan secara tatap muka atau langsung menjadi dialihkan secara tidak langsung (*online*). Bukan hanya itu saja, perubahan di berbagai sektor kehidupan seperti sektor sosial, kesehatan, ekonomi, politik, hingga pendidikan juga mengalami kekacauan sehingga diperlukan regulasi untuk menghadapi tantangan terhadap dampak pandemi tersebut. Pemerintah di Indonesia sendiri mulai mengambil beberapa langkah untuk mengurangi penyebaran virus ini dengan

cara menerapkan kebijakan *lockdown* atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada awal bulan April tahun 2020 dan berganti istilah menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada tahun 2021.

Melihat situasi tersebut disertai dengan kebijakan PPKM tentunya berdampak pada seluruh masyarakat, terutama pada masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah. Dari pemberlakuan peraturan ini mereka terpaksa tetap bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari di tengah pandemi. Dengan masyarakat yang terus terpaksa untuk mencari nafkah tersebut merupakan salah satu bentuk strategi bertahan hidup di tengah kondisi seperti sekarang ini, walaupun tidak sedikit diantara mereka yang mengalami teguran akibat melanggar aturan saat dijalankannya kebijakan PPKM. Strategi bertahan hidup itu sendiri dapat dimaknai dengan beberapa definisi, yaitu diantaranya sebagai sebuah rumusan bagaimana masyarakat bisa *survive* dengan kebutuhan pangan yang ada, lalu bisa juga dipandang sebagai upaya bagaimana individu atau masyarakat bisa melihat keadaan subsistem sekitar dengan cara mencari kegiatan ataupun pekerjaan yang tingkatannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (Rizter 2012, sebagaimana dikutip dalam Liya dan Satriyanti, 2021: 195).

Salah satu contoh masyarakat kelas menengah kebawah yang terkena dampak dari pandemi serta merasakan sulitnya bekerja sehingga harus memiliki strategi untuk bertahan hidup pada saat diberlakukannya PPKM ialah masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir yakni para nelayan di wilayah Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Walaupun mereka bekerja di laut, bukan berarti terhindar dari kebijakan PPKM, para nelayan pun harus beradaptasi dengan keadaan saat ini. Mereka harus mulai beradaptasi seperti misalnya terkait dengan waktu melaut, yang mana para nelayan diwajibkan menggunakan berbagai protokol kesehatan, selain itu aktivitas melaut mereka juga dibatasi sehingga para nelayan harus berangkat lebih pagi saat melaut. Dengan adanya waktu yang dibatasi tersebut berdampak pada perolehan pendapatan yang cenderung tidak sesuai dan jumlahnya sangat sedikit.

Situasi di tengah pandemi seperti sekarang ini membuat para nelayan memilih untuk tunduk dengan peraturan yang ada, karena mereka berada pada pihak yang tidak memiliki kekuasaan (*powerless*). Namun disisi lain mereka merasa kesulitan atau mengalami konflik batin dan juga terkadang mereka memberikan kritik terhadap berbagai kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah seperti melalui diskusi antar warga. Kondisi seperti ini pun juga dirasakan oleh nelayan yang berada di daerah sekitar PPN Karangantu, Banten

yang dijelaskan oleh Hamzah dan Nurdin (2020: 78). Para nelayan di daerah sana pun juga mengalami berbagai kesulitan selama diberlakukannya pembatasan di DKI Jakarta, seperti contohnya yaitu keterlambatan dalam hal kegiatan distribusi ikan hasil tangkapan selama tiga bulan terakhir. Dampak lainnya yang dirasakan oleh nelayan PPN Karangantu pun hampir sama seperti yang dirasakan oleh nelayan di Kampung Nelayan Ciling, Jakarta Utara yaitu mengenai turunnya harga jual ikan, pengurangan jumlah ABK (Anak Buah Kapal), dan frekuensi melaut pun mengalami perubahan.

Penelitian ini sangat menarik untuk dibahas, karena dampak dari adanya Covid-19 tidak hanya dirasakan masyarakat yang beraktivitas di darat saja, melainkan masyarakat yang memiliki aktivitas sehari-hari di laut seperti para nelayan. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena dampak yang dialami oleh nelayan juga berpengaruh pada sektor ekonomi dan sosial seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dengan melihat berbagai permasalahan yang ada tersebut mendorong kami selaku peneliti untuk mengangkat judul penelitian mengenai **“Resistensi Nelayan Cilincing Di Masa Pandemi Covid-19”**, di mana kami ingin melihat bagaimana resistensi pola nafkah dari masyarakat yang bermatapencarian sebagai nelayan di Kampung Nelayan, Cilincing, Jakarta Utara dalam menghadapi berbagai kesulitan yang tengah mereka rasakan sekarang pada masa pandemi Covid-19.

Dengan adanya latar belakang seperti yang sudah dijelaskan di beberapa paragraf sebelumnya, maka dari itu dirumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana persepsi nelayan terhadap kebijakan PSBB?; 2) Bagaimana perubahan strategi nafkah yang dilakukan oleh nelayan selama masa PSBB?; dan 3) Bagaimana bentuk resistensi nafkah nelayan selama PSBB?.

Data yang didapatkan dalam tulisan ini didapatkan berdasarkan hasil survey, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan para narasumber yaitu tiga orang nelayan dan informan pendukung seperti istri, tetangga, maupun kerabat dekat para nelayan. Serta, data primer tersebut diperkuat dengan data-data sekunder seperti jurnal, artikel, dan buku.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Strategi Nafkah

Menurut Dharmawan (2007, sebagaimana dikutip dalam Saraswati dan Dharmawan, 2014: 65) strategi nafkah bukan strategi nafkah bukan sekedar *means of living* yang bermakna sebagai mata pencaharian. Pengertian strategi nafkah lebih mengacu pada pengertian *livelihood*

strategy (strategi penghidupan) yaitu strategi membangun sistem penghidupan, cara bertahan hidup atau memperbaiki status kehidupan. Strategi nafkah suatu rumahtangga menyangkut keberlangsungan hidup anggota rumahtangga tersebut. Ellis menyatakan (2000, sebagaimana dikutip dalam Fridayanti dan Dharmawan, 2013: 29) strategi nafkah ialah penghidupan yang terdiri dari aset (alam, fisik, manusia, modal keuangan, dan modal sosial), kegiatan, dan akses (yang dimediasi oleh kelembagaan dan hubungan sosial) yang bersama-sama menentukan kehidupan individu atau rumah tangga.

Pada strategi nafkah yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki beberapa komponen sebagai berikut.

Pola Nafkah Ganda, yakni merupakan mata pencaharian sampingan oleh para nelayan sebagai bentuk memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, apabila tidak diperbolehkan melaut para nelayan memanfaatkan perahu yang mereka miliki untuk disewakan kepada para pengunjung yang ingin memancing di Pulau Seribu.

Keterlibatan Anggota Keluarga, yakni penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para nelayan dibantu oleh para anggota keluarga lainnya seperti, istri, anak, atau kerabat yang berjualan kerang maupun hasil laut lainnya.

Pendayagunaan jaringan sosial, yakni pemanfaatan relasi dari berbagai kerabat dekat seperti, tetangga, teman satu profesi, maupun bantuan dari lembaga atau pihak lain kepada nelayan. Misalnya, peminjaman modal untuk melaut seperti kebutuhan bahan bakar maupun umpan. Serta memanfaatkan bantuan sosial dari pemerintah atau pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Konsep Resistensi

James Scott menyatakan (1993, sebagaimana dikutip dalam Satriani, dkk, 2018: 410) resistensi kemudian dipahami sebagai sebuah respon terhadap suatu inisiatif perubahan, suatu respon hasil rangsangan yang membentuk kenyataan dimana individu hidup. Dalam menghadapi berbagai tekanan yang dilakukan pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang geraknya. Adapun resistensi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor-faktor antara lain sebagai berikut (Satriani, dkk 2018: 411-412):

Faktor Budaya dan Ekonomi, yakni adanya budaya mata pencaharian turun-menurun sebagai nelayan. Mayoritas anggota keluarga atau generasi tua hingga generasi muda di sana bekerja menjadi nelayan sebagai mata pencaharian utama. Sehingga mereka terbiasa hidup dengan lingkungan maritim. Di sisi lain kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang didukung oleh keahlian menjadi nelayan. Sehingga hal ini mendorong para nelayan untuk tetap bekerja di laut, dibandingkan mencari keahlian atau mata pencaharian lain di darat. Sebab, dibutuhkan waktu yang lama dan modal yang tidak sedikit untuk beradaptasi.

Faktor Struktur, yakni adanya mata pencaharian para nelayan yang memiliki fokus dan tujuan masing-masing. Misalnya, nelayan sawit, nelayan sero, dan nelayan selam yang mana para nelayan tersebut memiliki fokus pencaharian hasil tangkapan yang berbeda-beda sehingga perolehan penghasilannya pun berbeda seperti, nelayan selam yang saat ini hanya tersisa dua kelompok. Lalu, nelayan sero yang banyak beralih menjadi nelayan sawit. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan dan air laut yang semakin tercemar. Sehingga para nelayan sero dan nelayan selam tidak memperoleh hasil laut seperti ikan maupun kerang yang cukup banyak.

Faktor Lingkungan dan Sarana Sosial, yakni dipengaruhi oleh lingkungan alam maupun sosial hal ini dilihat dari kondisi lingkungan yang kumuh, air laut yang tercemar, dan karakter penduduk yang apatis. Sehingga masyarakat di sana terutama para nelayan sulit untuk melaksanakan mobilitas sosial dalam mencapai kehidupan yang layak.

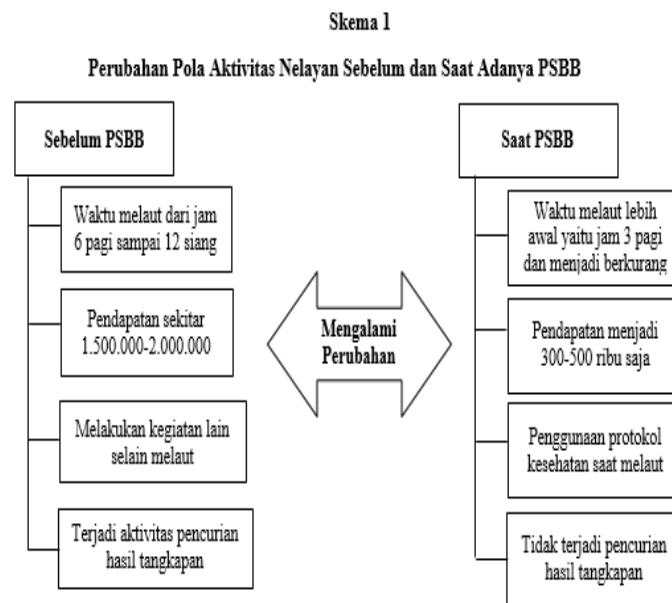
HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Nelayan Terhadap Penerapan Kebijakan PSBB

Berbicara mengenai pandemi covid-19 yang sedang melanda di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia tentu memberikan dampak kepada berbagai sektor kehidupan dalam bermasyarakat. Salah satu sektor yang terkena dampaknya ialah sektor perikanan lokal. Nelayan yang menjadi salah satu pendukung dalam meningkatkan sektor perikanan lokal di Indonesia pun merasakan dampak akibat adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang segera diterapkan oleh pemerintah pada saat awal pandemi covid-19 masuk ke negara Indonesia. Dengan diterapkannya kebijakan PSBB membawa beberapa perubahan bagi nelayan, terutama dalam hal aktivitas melaut yang biasa dikerjakannya setiap hari.

Dampak dari adanya kebijakan PSBB ini pun diperkuat pada kondisi pasar yang bermasalah, di mana pasar ikan tersebut menjadi sepi pengunjung selama PSBB. Hal ini dapat

dipastikan bahwa aktivitas perekonomian tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya dan tentunya akan berdampak pada siklus perekonomian masyarakat pesisir. Seperti yang dikutip dalam Setiani dan Yulianto (2021: 3) bahwa dampak PSBB pada masyarakat pesisir juga dapat menyerang mulai dari sektor budaya, sosial, lingkungan, hingga keamanan.



Sumber : Analisis Peneliti (2020)

Gambar 1. Perubahan Pola Aktivitas Nelayan Sebelum dan Saat Adanya PSBB (Sumber : Analisis Peneliti (2020))

A. Perubahan Waktu Melaut Sebelum dan Selama PSBB

Dalam kasus ketiga nelayan yang menjadi informan dalam penelitian kami yaitu Bapak Suherbi, Bapak Halimudin, dan Bapak Hamzah, mereka bertiga memberikan beberapa pernyataan yang hampir serupa antara satu sama lain dalam menanggapi terkait adanya kebijakan PSBB saat ini yang ada membawa pengaruh dalam aktivitas mereka untuk melaut. Menurut ketiga informan dengan adanya kebijakan PSBB dapat memberikan pengaruh terhadap lamanya waktu yang digunakan pada saat mereka ingin melaut. Perubahan waktu melaut itu pun sangat terlihat perbedaannya, pada saat diberlakukan PSBB terkadang mereka harus keluar lebih awal untuk melaut yaitu sekitar jam 3 pagi untuk menghindari dari penjagaan polisi air. Padahal biasanya sebelum diterapkannya PSBB, ketiga informan tersebut melakukan aktivitas melaut dimulai dari pukul 6 pagi sampai 12 siang. Dengan adanya perubahan tersebut otomatis menyebabkan waktu yang digunakan nelayan untuk melaut menjadi berkurang dari biasanya. Hal ini pun sejalan dengan pernyataan dari Bapak Hamzah, beliau mengatakan:

“Ya kami sekarang harus keluar lebih pagi dari biasanya untuk pergi melaut, sekitar 3 jam pagi. Karena saya pernah ketahuan oleh polisi air yang berjaga waktu itu, saya pun sementara dilarang untuk pergi melaut. Akhirnya sekarang kalau ingin melaut harus curi-curi waktu agar tidak ketahuan oleh polisi air.” (Bapak Hamzah, 68 thn, 10 November 2020)

B. Perubahan Aktivitas Nelayan Saat Melaut Sebelum dan Selama PSBB

Berdasarkan dari temuan kami pada saat melakukan pengamatan para nelayan yang berada di Kampung Nelayan Cillincing tersebut tetap menggunakan berbagai protokol kesehatan yang diajarkan oleh pihak pemerintah selama diterapkannya kebijakan PSBB berlangsung. Karena berdasarkan penuturan para nelayan jika mereka tidak menggunakan berbagai protokol kesehatan, mereka akan semacam ‘ditilang’ oleh polisi air yang terkadang sedang berjaga. Hasil dari pengamatan kami ini pun diperkuat dengan pengakuan ketiga informan, jika para nelayan tidak menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan mereka akan dikenakan sanksi berupa teguran dan denda apabila terus-menerus melakukan pelanggaran tersebut. Tetapi tidak jarang juga polisi air yang sedang berjaga akan memberikan masker kepada para nelayan yang ketahuan tidak menggunakan masker pada saat sedang melaut.

Aktivitas nelayan lainnya yang mengalami perubahan sebelum dan saat adanya kebijakan PSBB ialah mengenai aktivitas pencurian hasil tangkapan laut. Ketiga informan menyatakan bahwa sebelum adanya kebijakan PSBB sering terjadi aktivitas pencurian hasil tangkapan laut. Aktivitas pencurian ini pun tidak diketahui secara pasti siapa pelakunya, karena berdasarkan pernyataan dari ketiga informan para pelaku tersebut sering melakukan pencurian pada saat hasil tangkapan sedang ditinggalkan oleh nelayan. Ketiga informan lebih sering mengikhhlaskan hasil tangkapannya dicuri, karena mereka pun tidak mengetahui siapa pencurinya dan darimana asalnya. Tetapi berdasarkan pernyataan Bapak Halimudin, beliau pernah mendengar kabar bahwa nelayan yang sering mencuri hasil tangkapan nelayan lainnya ialah berasal dari daerah Bekasi yaitu Muara Gembong, serta terdapat dari pihak RT setempat juga yang pernah melakukan aktivitas pencurian hasil tangkapan ikan ini. Bapak Halimudin mengatakan:

“Sering terjadi pencurian hasil tangkapan, hampir tiap malam malah. Sekarang malahan seronya pun ikut diambil. Kita di sini, mereka yang mencuri kan ada di laut. Asal ada kesempatan untuk mencuri, ya mereka langsung ngambil hasil tangkapan kita.” (Bapak Halimudin, 61 thn, 10 November 2020)

Namun setelah adanya kebijakan PSBB aktivitas pencurian hasil tangkapan ikan tersebut pun mulai berkurang, karena berdasarkan kesimpulan dari pernyataan mereka pun kurang lebih seperti ini:

“Apa yang mau dicuri oleh mereka? kami sendiri pun akhir-akhir ini sedang kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkapan laut.” (Bapak Suherbi, 34 thn, 10 November 2020)

C. Perubahan Kegiatan Nelayan Selain Melaut Sebelum dan Selama PSBB

Sebelum adanya kebijakan PSBB, ketiga informan tersebut mempunyai kegiatan lain yang dilakukan untuk menambah pendapatan mereka. Dalam kasus Bapak Suherbi dan Bapak Hamzah, sebelum adanya PSBB mereka senantiasa melakukan kegiatan lain yaitu seperti menjahit *waring* yang rusak untuk digunakan menangkap hasil tangkapan. Selain Bapak Suherbi dan Bapak Hamzah, tentu Bapak Halimudin pun juga memiliki kegiatan lain yaitu beliau sering memanfaatkan perahu yang digunakannya melaut untuk disewakan mengantar para tamu yang ingin melakukan kegiatan memancing di Pulau Damar. Namun, setelah adanya kebijakan PSBB tamu yang datang untuk memancing tersebut frekuensinya menjadi berkurang, sehingga Bapak Halimudin pun hanya memperoleh pendapatan dengan mengandalkan dari hasil tangkapan melaut saja. Bapak Halimudin mengatakan:

“Saya kan kadang-kadang ada tamu ni untuk mancing di Pulau Damar, sekarang ini menjadi susah tidak ada tamu lagi yang datang. Semenjak corona ini tidak ada lagi yang datang untuk mancing.” (Bapak Halimudin, 61 thn, 10 November 2020)

Dengan demikian, sejak diterapkannya kebijakan PSBB pada saat pandemi covid-19 ini ternyata membawa pengaruh yang sangat terlihat pada aktivitas nelayan dalam kehidupan sehari-harinya, terutama pada saat melaut. Dimulai dari adanya perubahan waktu melaut yang menjadi lebih awal daripada biasanya, pendapatan yang diperoleh menjadi tidak signifikan dari sebelum adanya kebijakan PSBB, tidak adanya lagi kegiatan lain yang dilakukan selain menjadi nelayan, lalu tidak adanya lagi aktivitas pencurian hasil tangkapan laut, serta yang paling penting yaitu penggunaan protokol kesehatan bagi nelayan yang dianjurkan oleh pemerintah pada saat melaut.

Perubahan Strategi Nafkah Nelayan Selama Masa PSBB

Nelayan merasakan kerugian yang cukup banyak seperti berkurangnya pendapatan selama masa PSBB. Hal itu karena terdapat kebijakan berupa larangan melaut bagi para nelayan. Apabila terdapat nelayan yang terlihat melaut, akan dikenakan sanksi berupa denda dan larangan kembali ke daratan untuk sementara waktu.

Mengenai masalah pendapatan yang diperoleh sehari-hari mengalami perubahan yang terlihat cukup signifikan, pada awal sebelum diterapkannya PSBB ketiga informan tersebut memperoleh pendapatan sekitar 1.500.000 – 2.000.000/hasil tangkapannya. Namun setelah adanya kebijakan PSBB, pendapatan yang diperoleh nelayan pun menjadi tidak signifikan, sekarang mereka hanya memperoleh 300-500 ribu saja dan itu pun harus dibagi hasil dengan nelayan lain yang satu kelompok dan dipotong 25% untuk biaya meminjam kapal. Permasalahan ini pun sejalan dengan pernyataan yang diucapkan oleh Bapak Suherbi, beliau berkata:

“Setelah adanya kebijakan ini pendapatan kami menjadi tidak jelas, karena harga jual hasil tangkapan yang dijual ke pangkalan ikut menurun. Belum lagi hasil perolehan tersebut harus dibagi lagi kepada pemilik kapal, ya jadi kira-kira pendapatan kami sekarang hanya sekitar 300-500 ribu saja.” (Bapak Suherbi, 34 thn, 10 November 2020)

Penurunan pendapatan ini tidak hanya dirasakan oleh ketiga nelayan yang berasal dari Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam jurnal yang ditulis oleh Hendrayana, dkk (2021: 3) menjelaskan bahwa nelayan kepiting bakau yang berada di daerah Desa Mojo, Pemalang juga merasakan hal yang sama, yaitu pada saat terjadi Covid-19 membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian masyarakat di Desa Mojo. Para nelayan kepiting bakau di sana mengalami tersedatnya akses transportasi pengiriman kepiting, sehingga berdampak pada tingginya stok kepiting bakau yang ada dan menyebabkan penurunan harga kepiting bakau di pasaran. Hal ini diperkuat dengan salah satu pernyataan menurut Kholis et al, 2020 (sebagaimana di kutip dalam Hendrayana, dkk 2020: 4) bahwa dengan adanya pandemi covid-19 berdampak pada nelayan terhadap penurunan harga ikan, sehingga mempengaruhi pendapatan nelayan itu sendiri.

Sebelum adanya kebijakan PSBB, ketiga informan tersebut mempunyai kegiatan lain yang dilakukan untuk menambah pendapatan mereka. Dalam kasus Bapak Suherbi dan Bapak Hamzah, sebelum adanya PSBB mereka senantiasa melakukan kegiatan lain yaitu seperti menjahit *waring* yang rusak untuk digunakan menangkap hasil tangkapan. Selain Bapak Suherbi dan Bapak Hamzah, tentu Bapak Halimudin pun juga memiliki kegiatan lain yaitu beliau sering memanfaatkan perahu yang digunakannya melaut untuk disewakan mengantar para tamu yang ingin melakukan kegiatan memancing di Pulau Damar. Namun, setelah adanya kebijakan PSBB tamu yang datang untuk memancing tersebut frekuensinya menjadi berkurang, sehingga Bapak Halimudin pun hanya memperoleh pendapatan dengan mengandalkan dari hasil tangkapan melaut saja. Bapak Halimudin mengatakan:

“Saya kan kadang-kadang ada tamu ni untuk mancing di Pulau Damar, sekarang ini menjadi susah tidak ada tamu lagi yang datang. Semenjak corona ini tidak ada lagi yang datang untuk mancing.” (Bapak Halimudin, 61 thn, 10 November 2021)

Sampai pada akhirnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para nelayan hanya mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah. Hal itu dikarenakan tidak ada pilihan lain dari apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga informan jarang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah padahal sudah melakukan pengajuan untuk menerima bantuan, termasuk bantuan sosial yang sifatnya khusus untuk lansia. Serta yang menerima bantuan hanya warga yang memiliki KTP DKI Jakarta saja. Penjelasan tersebut diperkuat dengan Pak Halimudin yang mengatakan bahwa :

“Paling memenuhinya ya dari sembako yang dikasih pemerintah, itupun gak semua dapet, paling yang ada KTP DKI aja, ya habisnya mau gimana lagi.” (Bapak Halimudin, 61 thn, 10 November 2020)

Berdasarkan berbagai pernyataan dari ketiga informan dapat dilihat bahwa ternyata dari adanya kebijakan PSBB tersebut memberikan beberapa kerugian tersendiri kepada pihak nelayan diantaranya yaitu, berkurangnya pendapatan yang diperoleh sehingga berakibat kepada kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti modal untuk membeli solar menjadi berkurang, serta harga jual hasil tangkapan yang menurun karena beberapa pabrik pengolah hasil laut banyak yang ditutup sementara. Oleh karena itu, ketiga informan dan nelayan lainnya pun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan dari bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah saja. Serta, ketiga informan pun hanya berharap keadaan dapat kembali membaik serta bantuan tetap berjalan sesuai peraturan yang ada.

Bentuk Resistensi Nelayan Selama PSBB

Strategi keberterahanan keluarga, dalam hal ini para keluarga nelayan banyak yang bekerja di pabrik dekat lokasi sebagai karyawan atau buruh. Namun, saat pandemi banyak diantara mereka yang mengalami PHK sehingga terpaksa tidak bekerja. Aktivitas para nelayan pun dibatasi untuk melaut. Hal ini mengakibatkan kebutuhan sehari-hari mereka tidak terpenuhi secara maksimal. Untuk mensiasati agar pemasukan keuangan dalam keluarga dapat terpenuhi, maka pihak keluarga nelayan seperti anak atau istri mereka membantu memenuhi kebutuhan dengan membuka usaha atau berjualan kerang dan hasil laut lainnya. Upaya ini dilakukan saat PSBB diberlakukan, sebab tidak ada cara lain lagi yang bisa dipenuhi selain dengan berjualan. Disisi lain, mereka juga mengandalkan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah.

ANALISIS

Sebelum masa pandemi, para nelayan mampu menjalani aktivitas melaut dengan normal dan penghasilan yang cukup. Hanya saja limbah pencemaran laut dan elama pandemi covid-19, pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), yakni seluruh aktivitas yang masyarakat dibatasi agar penularan virus covid-19 tidak semakin menyebar. Peraturan tersebut menjadi upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah virus covid-19 ini. Namun, ternyata peraturan tersebut memiliki berbagai persoalan di berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini, dampak yang dirasakan bukan hanya masyarakat yang menjalani kehidupan sehari-hari di daratan, tetapi masyarakat yang terbiasa menuhi kebutuhan hidupnya di perairan, salah satunya ialah nelayan. Pembatasan aktivitas juga diberlakukan di perairan dengan ditiadakannya aktivitas melaut bagi para nelayan. Sehingga hal ini berpengaruh besar kepada para nelayan terutama dalam hal pendapatan. Para nelayan terpaksa mencuri waktu melaut saat sebelum adanya petugas polisi air yang berjaga di ujung dermaga. Sebab, apabila tindakan para nelayan tersebut diketahui oleh petugas, maka mereka akan dikenakan sanksi berupa penyitaan perahu dan pembayaran denda. Dampak lain juga terasa saat banyak perusahaan olahan hasil laut terpaksa tutup, sehingga mengurangi pasokan hasil laut yang diterima. Hal inilah yang menjadi salah satu dampak besar bagi para nelayan sehingga hasil tangkapan mereka tidak terjual sehingga tidak memperoleh penghasilan, sedangkan kebutuhan hidup harus senantiasa terpenuhi.

Para nelayan terpaksa nekat melaut dengan mencuri waktu melaut pukul tiga pagi hingga enam pagi sebelum polisi air berjaga di ujung dermaga. Sebab tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, banyak pihak keluarga nelayan seperti istri dan saudara mereka di PHK dari pabrik tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, mereka membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan kerang atau hasil laut dan membuka usaha kecil. Apabila para nelayan tidak memiliki modal untuk melaut, mereka juga terpaksa meminjam uang kepada koperasi nelayan untuk membeli bahan bakar kapal. Para nelayan hanya pasrah dengan keadaan, sebab mereka tidak memiliki keahlian lain di daratan untuk mencari pekerjaan selain melaut. Para nelayan berharap agar pandemi segera usai sehingga PSBB atau PPKM yang diberlakukan segera dihentikan sehingga mereka dapat dibolehkan melaut kembali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa dampak selama masa pandemi covid-19 juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk para pekerja yang mencari penghasilan di perairan yakni para nelayan. Banyak diantara mereka yang mengalami penurunan pendapatan akibat adanya PSBB dan pelarangan melaut. Akibatnya, para nelayan mengandalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti meminjam dana ke koperasi untuk membeli bahan bakar kapal, berjualan kerang atau hasil laut lain serta membuka usaha kecil yang dijalankan oleh keluarga nelayan.

Dalam hal ini, sebaiknya Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan keringanan peraturan khusus kepada para nelayan. Sebab, kondisi di laut sangat berbeda dengan kondisi di daratan. Proses penularan virus pun sangat minim di kawasan perairan karena mereka memiliki jarak yang sangat jauh antara kapal satu dengan kapal lainnya di tengah laut. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian agar kebijakan yang diberlakukan bersifat masuk akal dan dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Fridayanti, N., & Dharmawan, A. H. (2013). Analisis struktur dan strategi nafkah rumahtangga petani sekitar kawasan hutan konservasi di Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi. *Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor*.
- Hamzah, A., & Nurdin, H. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Masyarakat Nelayan Sekitar PPN Karangantu. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 4(1), 073-081.
- Hendrayana, H., Husni, I. A., & Raharjo, P. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Nelayan Kepiting Bakau Di Desa Mojo, Pemalang. *Prosiding*, 10(1).
- Liya, R. N. E., & Satriyati, E. (2021, September). Ketahanan Hidup Buruh Peternak Ayam dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gresik. In *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan* (Vol. 1, No. 1).
- Saraswati, Y., & Dharmawan, A. H. (2014). Resiliensi nafkah rumahtangga petani hutan rakyat di Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(2), 63-75.
- Satriani, J., & Upe, A. (2018). Resistensi sosial masyarakat suku bajo (Studi kasus atas perlawanan masyarakat di pulau Masudu kecamatan Poleang Tenggara terhadap kebijakan resettlement ke desa Liano kecamatan Mataoleo kabupaten Bombana). *Jurnal Neo Societal*, 3(2).
- Setiani, M. F. D. A., & Yulianto, B. A. (2021). Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Bagi Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Sosiologi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 1-5.